

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Rektor IPDN (DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 Januari 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d seplesei
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Struktur dan Arah Kebijakan Penataan IPDN.
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H. /Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 35 Anggota Komisi II DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. RDP dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dibuka Pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Bapak **Rambe Kamarul Zaman** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat pada hari ini terkait pembahasan Struktur dan Arah Kebijakan Penataan IPDN.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rektor IPDN untuk memberikan pemaparannya.
4. Rektor IPDN memberikan pemaparan terkait dengan:
 - a. Dasar Hukum Proses terbentuknya IPDN;
 - b. Visi, Misi dan Tujuan IPDN;
 - c. Tugas, Fungsi dan Arah Kebijakan IPDN;
 - d. Program Kegiatan IPDN;
 - e. Fakultas dan Program Pendidikan IPDN;
 - f. Pola Pengasuhan Praja;
 - g. Kegiatan yang sudah dilakukan;
 - h. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan;
 - i. Kondisi Sumber Daya Manusia IPDN;
 - j. Permasalahan Yang dihadapi IPDN yang belum terselesaikan pada periode 2009-2014;
 - 1) Pembangunan wisma Praja IPDN sebanyak 4 (empat) unit telah sesuai dengan kriteria pemanfaatan dana optimalisasi berdasarkan hasil review BPKP dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, namun belum mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas;

- 2) Kegiatan pembangunan perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor tidak dapat dilaksanakan karena terdapat ketidaksesuaian dengan Renstra/RKP;
 - 3) Akreditasi pendidikan pada jurusan/prodi pada semua program vokasi dan akademik belum semuanya terakreditasi B;
 - 4) IPDN memiliki 2 Fakultas, dipersyaratkan mempunyai 3 Fakultas;
 - 5) Masih sedikitnya jumlah jabatan Fungsional Tertentu/Khusus.
- k. Isu Rencana Jangka Pendek IIPDN Tahun 2015
- 1) Penyusunan pedoman (tatacara) seleksi penerimaan Calon Praja IPDN;
 - 2) Pembangunan Kampus IPDN Kalimantan Barat Tahap II.
 - 3) Pembangunan Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor (Tahap I);
 - 4) Pembangunan ruang kelas Program D-IV dan S-1 di IPDN Kampus Jatinangor;
 - 5) Pembangunan ruang kerja dosen di IPDN Kampus Jatinangor;
 - 6) Peningkatan status akreditasi lembaga (IPDN) melalui Badan Akreditasi Perguruan Tinggi/BAN PT.
 - 7) Pemetaan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus.
 - 8) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 9) Mengusulkan Program Legislasi produk hukum terkait IPDN melalui kerjasama dengan Biro Hukum Kemendagri;
 - 10) Revisi Permendagri tentang Statuta IPDN;
 - 11) Revisi Permendagri tentang Peraturan tata Kehidupan Praja.
- l. Skala Prioritas Jangka Menengah 2016 dan Permasalahan yang muncul
- 1) Skala Prioritas Jangka Menengah Tahun 2016;
 - a) Statute dan Kelembagaan, meliputi:
 - (1) Revisi Permendagri tentang statute IPDN, tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN;
 - (2) Penyusunan Permendagri tentang Pola Karier Alumni;
 - (3) Pembukaan Tambahan 3 (tiga) Kampus IPDN di daerah;
 - (4) Penambahan Fakultas Hukum Tata Pemerintahan;
 - (5) Peningkatan Status Unit Penjamin Mutu (UPM) menjadi Lembaga Penjamin Mutu Internanl (LPMI);
 - (6) Peningkatan Status Pusat Bimbingan dan Konseling menjadi Lembaga Pengembangan SDM Praja dan Karyawan;
 - (7) Pembentukan Pusat-pusat Kajian Pemerintahan;
 - b) Bidang Akademik, Bidang Pengasuhan
 - c) Pengembangan Kualitas SDM
 - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Mutu Pendidikan.
 - 2) Permasalahan yang muncul
 - a) Akreditasi institusi IPDN masih B
 - b) Pola Karier pengasuh belum tertata dengan baik
 - c) Belum proposionalnya sebaran dosen sesuai bidang keilmuannya pada Kampus IPDN di daerah.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional khususnya di bidang pengawasan akan terus menerus mengevaluasi dan menyampaikan saran terhadap pengembangan IPDN baik dari sisi pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan tanpa kekerasan dan pengawasan yang baik.
2. Komisi II DPR RI mendukung untuk dijabarkan secara terencana sistematis di bidang pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam mengembangkan pendidikan kepengmangprajaan dengan sistem tritunggal yang terpusat sekaligus laboratorium revolusi mental di bidang birokrasi pemerintahan.
3. Komisi II DPR RI mendukung adanya penjaminan mutu di IPDN, penataan struktur, jabatan fungsional, pola karir alumni sekaligus untuk meningkatkan dan mendapatkan akreditasi yang lebih baik dan menata posisi IPDN dengan memperbaiki Permendagri No. 41 tahun 2010.
4. Komisi II DPR RI sepakat agar akreditasi IPDN dapat ditingkatkan ke akreditasi A dalam semua program studinya dan sepakat agar dibangun ruang-ruang perpustakaan di setiap tingkatan fakultas yang ada, serta segera dilaksanakan pola peningkatan SDM tenaga pendidikan agar dapat menjadi yang handal.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada IPDN agar pola dalam rekrutmen calon mahasiswa harus direncanakan dengan baik yang bersih jauh dari segala bentuk yang berbasis KKN, Anarkis, dan Premanisme bagi calon intelektual yang akan lulus.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

JAKARTA, 27 JANUARI 2015
PIMPINAN KOMISI II DPR RI

ttd

RAMBE KAMARUL ZAMAN
A-236